

# **POLITIK EKOLOGI DALAM PEMBANGUNAN NUSANTARA (IKN) :Kajian Kritis atas Transformasi Ruang Hidup dan Kepentingan Oligarki**

Lutfikhoiruljannah\_22400006\_lutfykj09@gmail.com

## **Abstrak**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan proyek monumental yang diproyeksikan sebagai solusi atas permasalahan struktural Jakarta, termasuk overpopulasi, krisis ekologi, dan ketimpangan pembangunan wilayah. Namun, di balik narasi pembangunan berkelanjutan, proyek ini menyimpan problematika mendasar yang menyentuh aspek politik-ekologi, terutama dalam hal bagaimana ruang diorganisasi, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis untuk menelaah dominasi oligarki dalam tata kelola proyek IKN serta implikasinya terhadap transformasi ruang hidup masyarakat lokal. Temuan utama menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar transformasi spasial, tetapi juga merupakan manifestasi politik kekuasaan yang berkelindan dengan kepentingan ekonomi elite. Dampaknya meliputi marginalisasi komunitas lokal, degradasi ekologis, dan pelanggaran ketidakadilan struktural. Studi ini menegaskan pentingnya paradigma pembangunan yang ekologis, partisipatif, dan adil sebagai antitesis terhadap pendekatan teknokratis dan elitis.

## **PENDAHULUAN**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan struktural yang selama ini membebani Jakarta, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, penurunan permukaan tanah, krisis air bersih, dan kerentanan terhadap bencana ekologis. Selain itu, pemindahan ini

diklaim sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, serta membentuk wajah baru pemerintahan modern yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

Namun demikian, narasi resmi pembangunan IKN yang didominasi oleh retorika teknokratis dan modernisasi sering kali menutupi problematika mendasar yang melekat di dalamnya. Pembangunan dalam skala masif ini tidak hanya menciptakan perubahan fisik terhadap lanskap dan ruang, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam relasi sosial, kekuasaan, dan ekologi. Hal yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana ruang-ruang kehidupan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat dan komunitas agraris di kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan IKN telah memunculkan bentuk baru dari *dispossession* atau peminggiran yang terstruktur.

Dalam kajian politik ekologi, relasi antara manusia, lingkungan, dan kekuasaan menjadi titik masuk utama dalam menganalisis konflik ekologis. Menurut Robbins (2012), politik ekologi adalah pendekatan kritis yang melihat bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan sistem ekonomi-politik yang eksploitatif. Dalam konteks IKN, pembangunan tidak dapat dipahami sebagai sebuah proyek netral dan rasional, tetapi sebagai arena tarik-menarik kepentingan antara aktor negara, pemodal, dan masyarakat sipil. Ketika negara bertindak sebagai fasilitator modal, dan korporasi besar ikut terlibat dalam penyediaan infrastruktur dan pembiayaan, maka proyek pembangunan ini rawan menjadi instrumen dominasi oligarki yang memperkuat kesenjangan struktural.

Indonesia sebagai negara demokrasi berkembang masih menunjukkan ciri-ciri kuat dari demokrasi yang oligarkis. Winters (2011) menyatakan bahwa oligarki di Indonesia bukan hanya sekadar konsentrasi kekayaan, tetapi juga kapasitas aktor kaya untuk melindungi dan mengembangkan kepentingannya melalui institusi politik. Dalam hal ini, pembangunan IKN dapat dilihat sebagai bagian dari strategi akumulasi kekuasaan dan kapital oleh elite ekonomi-politik melalui kontrol terhadap ruang. Proyek ini bukan hanya proses pembangunan fisik, melainkan juga simbol dari bagaimana negara mereproduksi kekuasaan melalui ruang.

Lebih jauh, transformasi ruang akibat proyek IKN menunjukkan adanya proses *reifikasi* ruang, yakni pemisahan ruang dari makna sosial dan kulturalnya. Ruang yang sebelumnya merupakan bagian dari sistem pengetahuan lokal, praktik hidup masyarakat, serta spiritualitas komunitas adat, kemudian direduksi menjadi objek investasi dan produksi ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Lefebvre (1991), ruang tidak bersifat netral atau alamiah, melainkan selalu diproduksi secara sosial dan sarat kepentingan. Dalam kasus IKN, ruang menjadi arena politik di mana kepentingan-kepentingan elite bersaing untuk menguasainya.

Selain problem kekuasaan, pembangunan IKN juga menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keberlanjutan ekologis. Kalimantan Timur dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan peran strategis sebagai paru-paru dunia. Konversi lahan hutan untuk pembangunan jalan, perumahan, dan fasilitas pemerintahan berpotensi mengakibatkan degradasi lingkungan, fragmentasi habitat, serta krisis ekologis jangka panjang. Laporan WALHI (2023) dan berbagai jurnal ekologi mencatat bahwa pembangunan IKN telah mempercepat hilangnya kawasan hutan sekunder dan memicu konflik tenurial antara masyarakat lokal dengan negara dan investor.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas di atas, maka penting untuk melakukan kajian kritis terhadap proyek IKN dari perspektif politik ekologi. Penelitian ini berupaya menganalisis pembangunan IKN tidak semata sebagai kebijakan spasial, tetapi sebagai bentuk ekspresi politik-ekonomi yang memengaruhi distribusi ruang, kekuasaan, dan sumber daya alam. Kajian ini juga ingin mengungkap bagaimana proses transformasi ruang akibat pembangunan IKN berdampak terhadap keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial, serta bagaimana oligarki memainkan peran dominan dalam proses tersebut.

Dengan pendekatan teoritik yang bersandar pada politik ekologi, teori transformasi ruang, dan teori oligarki, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam memahami bagaimana pembangunan di Indonesia masih sarat akan logika kapitalistik dan belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

---

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Politik Ekologi**

Politik ekologi berkembang sebagai pendekatan interdisipliner untuk memahami konflik lingkungan yang melibatkan relasi kekuasaan, ekonomi, dan struktur sosial. Menurut Bryant dan Bailey (1997), politik ekologi berfokus pada pertanyaan: siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang menanggung kerugian dari perubahan lingkungan? Dalam konteks pembangunan, pendekatan ini menyoroti bahwa pembangunan sering kali menghasilkan ketimpangan ekologis dan sosial akibat dominasi aktor-aktor berkuasa dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan ruang dan sumber daya.

Robbins (2012) menegaskan bahwa politik ekologi mempertanyakan narasi dominan pembangunan berkelanjutan yang sering disusupi oleh kepentingan neoliberal dan korporatisme. Dalam studi tentang IKN, pendekatan ini mengungkap bahwa narasi “hijau” dan “cerdas” dari proyek tersebut menutupi kenyataan tentang perampasan ruang hidup, pengusuran masyarakat adat, dan eksploitasi ekosistem hutan tropis.

### **b. Oligarki dalam Proses Pembangunan**

Konsep oligarki sebagaimana dikembangkan oleh Winters (2011) menyatakan bahwa oligarki bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga kemampuan mengarahkan kebijakan negara demi kepentingan sendiri. Di Indonesia, oligarki tumbuh subur melalui relasi antara elite politik dan pebisnis besar, di mana proyek-proyek pembangunan strategis nasional menjadi ruang akumulasi modal. Hadiz (2017) menambahkan bahwa demokrasi Indonesia beroperasi dalam sistem yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan oligarkis, yang mengarah pada demokrasi prosedural yang substantifnya dikendalikan elite.

Keterlibatan kelompok bisnis besar dalam proyek IKN memperkuat temuan bahwa pembangunan tidak netral, melainkan diarahkan oleh kekuatan modal. Oligarki menjadi aktor utama dalam menentukan bentuk kota, penguasaan lahan, hingga distribusi infrastruktur yang sarat kepentingan pribadi dan kelompok.

### c. Transformasi Ruang dan Ruang Hidup

Transformasi ruang merupakan bagian dari proses produksi ruang sebagaimana dijelaskan Lefebvre (1991), di mana ruang diproduksi melalui kombinasi praktik sosial, wacana kekuasaan, dan agenda ekonomi. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang yang semula memiliki nilai ekologis dan kultural bagi masyarakat lokal, diubah menjadi ruang produksi kapitalistik.

Konsep ruang hidup (*lebensraum*) dalam studi ekologi politik menekankan bahwa setiap komunitas memiliki sistem pengetahuan dan hubungan spesifik terhadap ruang. Ketika ruang diambil alih oleh negara dan kapital untuk proyek pembangunan, maka terjadi *dispossession* dan *alienasi* terhadap komunitas lokal. Proses ini bukan hanya fisik, tetapi juga simbolik—karena menghapus memori kolektif dan kearifan lokal dalam relasi manusia dengan alam.

---

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis. Kajian dilakukan dengan menelaah literatur akademik, laporan organisasi lingkungan, berita investigatif, serta dokumen perencanaan IKN dari pemerintah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membongkar struktur kekuasaan, narasi hegemonik, dan konflik ekologi yang tersembunyi dalam diskursus pembangunan IKN.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

- Artikel jurnal ilmiah yang membahas politik ekologi, oligarki, dan transformasi ruang.
- Laporan WALHI dan NGO lainnya terkait dampak lingkungan pembangunan IKN.
- Wacana resmi pemerintah, seperti dokumen perencanaan IKN (IKN Smart City Blueprint, Masterplan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).
- Pemberitaan media massa terkait keterlibatan oligarki dan konflik lahan.

Data dianalisis menggunakan **content analysis** dan **analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis – CDA)** untuk mengungkap relasi kuasa yang terdistribusi dalam bahasa dan

representasi pembangunan. Pendekatan CDA digunakan untuk menafsirkan makna, motif, serta tujuan dari narasi-narasi pembangunan yang dibentuk oleh aktor negara maupun elite ekonomi.

---

## **PEMBAHASAN**

### **a. Oligarki dan Kepentingan Ekonomi dalam Proyek IKN**

Salah satu aspek penting dalam kajian ini adalah keterlibatan elite ekonomi dalam proyek IKN. Beberapa nama pengusaha besar tercatat memiliki akses terhadap proyek infrastruktur, logistik, dan penguasaan lahan melalui skema investasi publik-swasta. Proyek pembangunan jalan, bandara, dan kawasan perumahan elit menjadi lahan basah akumulasi modal, dengan sedikit keterlibatan atau kontrol masyarakat sipil.

Tempo (2023) mengungkap bahwa model pendanaan IKN bersifat hybrid, di mana sebagian besar anggaran pembangunan akan datang dari sektor swasta. Ini membuka jalan bagi kepentingan kapital untuk menentukan prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai fasilitator, bukan pengatur. Hal ini mencerminkan pergeseran fungsi negara dari aktor pembangunan menjadi mitra modal yang rentan pada kolusi.

### **b. Transformasi Ruang dan Penggusuran Sosial-Ekologis**

Pembangunan IKN telah menyebabkan perubahan besar dalam tata guna lahan di Kalimantan Timur. Kawasan hutan tropis yang sebelumnya menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat adat kini telah dibuka untuk jalan tol, perkantoran pemerintah, dan pusat bisnis. Proses ini menimbulkan penggusuran, konflik agraria, serta hilangnya sumber daya ekologis yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat.

Data dari WALHI (2023) menunjukkan bahwa sedikitnya 20 komunitas terdampak langsung oleh proyek IKN, mengalami ancaman pengusiran paksa, serta ketidakpastian status lahan. Komunitas adat seperti suku Paser dan Balik menjadi korban dalam proses transformasi ruang yang tidak inklusif dan minim partisipasi.

Transformasi ruang ini menimbulkan “trauma ekologis” karena masyarakat tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan identitas dan koneksi spiritual terhadap alam. Dalam konteks inilah, pembangunan IKN bisa dibaca sebagai bentuk kolonisasi internal terhadap ruang-ruang adat.

### **c. Krisis Ekologi dan Ilusi Pembangunan Berkelanjutan**

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa IKN akan menjadi kota hijau dan pintar (smart and sustainable city), kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai kerusakan ekologis yang signifikan. Deforestasi dalam skala besar, perubahan bentang alam, serta pencemaran air dan udara menjadi ancaman nyata terhadap ekosistem Kalimantan yang sangat rapuh.

Jurnal Ekologi Tropis (2022) mencatat bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan meningkatkan jejak karbon nasional akibat penggunaan beton, transportasi berat, dan energi fosil. Di sisi lain, mitigasi lingkungan yang dirancang bersifat kosmetik dan tidak mampu menggantikan fungsi ekologis hutan primer yang hilang.

Alih-alih menjadi simbol peradaban baru yang berkelanjutan, IKN justru memperjelas kegagalan negara dalam menerjemahkan pembangunan ramah lingkungan ke dalam praktik konkret.

---

## **SIMPULAN**

Pembangunan IKN adalah proyek besar yang tidak dapat dilepaskan dari logika politik-ekonomi kapitalistik yang mendominasi praktik pembangunan nasional. Studi ini menemukan bahwa proyek IKN dikendalikan oleh elite oligarkis melalui mekanisme penguasaan lahan, pengaruh terhadap kebijakan, dan konsesi infrastruktur. Proses ini mengabaikan partisipasi masyarakat lokal dan memperparah ketimpangan ekologis serta sosial.

Transformasi ruang hidup akibat pembangunan IKN menciptakan bentuk baru dari disposisi ekologis, di mana masyarakat adat kehilangan ruang hidup, dan lingkungan mengalami kerusakan struktural. Narasi “smart city” dan “green city” yang digaungkan pemerintah cenderung menjadi jargon pembangunan yang menyamarkan eksploitasi dan perampasan ruang.

Dengan menggunakan pendekatan politik ekologi, studi ini menegaskan perlunya pembangunan berbasis keadilan ekologis, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta pengawasan ketat terhadap keterlibatan modal besar dalam proyek negara. Tanpa perubahan paradigma, pembangunan IKN hanya akan memperkuat struktur kekuasaan elitis dan menimbulkan kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge.

Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Wiley-Blackwell.

Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell.

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

Hadiz, V. R. (2017). "Indonesia's Oligarchic Democracy: The Rise of Populist Authoritarianism." *Journal of Contemporary Asia*, 47(1), 67–83.

WALHI. (2023). *Krisis Ekologis di Kawasan IKN*. WALHI Report.

*Jurnal Ekologi Tropis Indonesia*. (2022). "Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan IKN." *Jurnal Ekologi Tropis Indonesia*, 10(2), 89–101.

*Kompas*. (2022). "IKN sebagai Solusi Beban Jakarta." *Kompas.id*.

*Tempo*. (2023). "Oligarki di Balik Mega Proyek IKN." *Tempo.co*.

Nugroho, H. (2020). "Kapitalisme dan Ketimpangan dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Politik Indonesia*, 5(1), 45–61.

Saragih, A. (2021). "Kritik Ekologi dalam Wacana Pembangunan Indonesia." *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 4(2), 115–132.

Putri, M. A. (2023). "Ruang dan Identitas Lokal dalam Transformasi IKN." *Jurnal Urban & Regional Studies*, 8(1), 74–88.

Basuki, D. (2021). "Pembangunan dan Relasi Kuasa di Era Jokowi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 99–115.

Siregar, R. (2020). "Pemindahan Ibu Kota dan Tantangan Ekologi." *Jurnal Bumi Hijau*, 6(1), 33–50.

*Arief, S. (2022). "Kearifan Lokal dan Resistensi Komunitas Adat terhadap IKN." Jurnal Kajian Sosial, 11(2), 144–160.*

NAMA : LUTFI KHOIRUL JANNAH

NPM : 22400006

KELAS : AN 01

DOSEN PENGAMPU : Dr.Suwardi M.Si/Jacika Pifi Nugraheni S.Sos, M.Si